

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Otonomi daerah sejak tahun 2001, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pendidikan selama ini, dari sentralisasi menuju desentralisasi pendidikan yang diharapkan akan dapat menumbuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam memikirkan dan memikul tanggung jawab pendidikan. Selain itu proses desentralisasi diharapkan juga akan menumbuhkan semangat demokratisasi dalam segala lini kehidupan termasuk dalam lingkungan pendidikan, sehingga segala macam kebijakan pendidikan selayaknya harus terkait erat dengan proses kebutuhan masyarakat setempat.

Hakekat desentralisasi pada dasarnya merupakan produk politik yang implikasinya pada pendelegasian urusan-urusan teknis dan administrasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, juga dibarengi dengan penguatan kelembagaan dan kekuatan-kekuatan sosial politik di daerah untuk terlibat secara lebih leluasa di dalam proses pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, Desentralisasi juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menyehatkan perekonomian daerah, berikut efisiensi dan efektivitas dalam pengaturan daerahnya masing-masing (Kacung Marijan : 2000). Dengan kata lain desentralisasi mengandung makna bahwa pemerintah pusat menyerahkan

beberapa jenis kewenangan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan, agar pemerintah daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*otonomi*).

Salah satu kewenangan yang diberikan pada pemerintah daerah (*otonomi*) adalah pendidikan, yang segera disambut dengan dikeluarkannya kebijakan MBS (Menejemen Berbasis Sekolah) atau yang lebih dikenal dengan *School Base Management*, yang pada intinya bertujuan mendayagunakan semua komponen lembaga sekolah dalam meningkatkan peran sertanya dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama difokuskan pada kondisi sosial-ekonomi daerah bersangkutan.

Kebijakan MBS tersebut juga berimplikasi pada proses pembelajaran, terutama dikondisikan untuk terkait erat dengan kehidupan lingkungan sosial-ekonomi masyarakat setempat, dengan harapan proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah dapat bermanfaat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konsep pendidikan, pembelajaran mempunyai kebermaknaan dengan kehidupan anak didik (*meaningful learning*). Hal ini tercermin dalam tujuan diimplementasikannya MBS yaitu *efektivitas proses pembelajaran*, dimana proses pembelajaran ditekankan pada pemberdayaan peserta didik, pembelajaran bukan sekadar transformasi dan mengingat, bukan sekadar penekanan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang diajarkan, akan tetapi lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang diajarkan sehingga tertanam nurani dan hayati serta

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari (Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat: 2001 : 35).

Begitu juga dengan pembelajaran akuntansi. Dalam kurikulum tahun 1994 disebutkan bahwa pembelajaran akuntansi mempunyai fungsi dan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap rasional, teliti, jujur dan bertanggung jawab melalui prosedur pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran transaksi keuangan perusahaan, dan penyusunan laporan keuangan secara benar menurut Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan mempunyai *tujuan* untuk membekali lulusannya berbagai kemampuan dan pemahaman, agar mereka menguasai dan mampu menerapkan konsep-konsep dasar, prinsip dan prosedur akuntansi yang benar, baik untuk kepentingan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ataupun untuk terjun ke masyarakat, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan mereka (Depdikbud :1995).

Untuk mencapai salah satu fungsi dan tujuan pembelajaran Akuntansi tersebut, yakni terjun ke masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang telah didapatnya di sekolah, maka sekolah harus mempersiapkan sistem pembelajaran yang mempunyai manfaat bagi anak didik untuk terlibat secara langsung dalam memecahkan problem-problem sosial ekonominya sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat sekitar, sebab menurut data Depdiknas tahun 1998/1999 hanya 53 % lulusan SMU/SMK/MA yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi (Fasli Jalal dan Dedi Supriadi:2001:29). Ini berarti sekitar 47 % lulusan SMU/SMK/MA tidak melanjutkan dan harus

mempunyai keterampilan serta pengetahuan yang berguna dalam memecahkan problem kehidupannya di masyarakat.

Berdasarkan data tersebut, maka SMU sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia dalam proses pembelajarannya semestinya tidak hanya mempersiapkan lulusannya melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, namun juga dipersiapkan untuk terjun ke masyarakat yakni dengan membekali berbagai keterampilan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan dunia usaha setempat.

Ini sejalan dengan tujuan diberlakukannya desentralisasi pendidikan seperti diungkapkan oleh Made Pidarta (2001:27) bahwa sekolah menghasilkan output berupa produk pendidikan yang lebih tepat guna, baik mutu maupun jumlahnya. Lulusannya harus disesuaikan dengan keinginan anak dan orang tua serta di masyarakat pendukung pendidikan harus juga disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan daerah setempat.

Namun dalam realitasnya pembelajaran akuntansi di SMU masih terkesan bersifat tradisional dengan kurikulum yang sentralistis yang mengacu pada kurikulum tahun 1994. Kurikulum tersebut disinyalir kurang memberikan keleluasaan bagi guru dan komponen sistem pembelajaran lainnya untuk mengembangkan materi, metode dan penilaian yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Selain itu juga pembelajaran dirasa kurang terkait dan jarang berinteraksi dengan dunia usaha masyarakat sekitar.

Di lain pihak desentralisasi pendidikan telah disambut sekolah dengan diberlakukannya MBS, namun apakah dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran akuntansi, desentralisasi pendidikan telah diadopsi dengan

memberikan keleluasaan bagi guru untuk mengembangkan materi, metode dan evaluasi untuk terkait dengan lingkungan siswa, sehingga peningkatan mutu pendidikan akan terealisasi sesuai dengan yang diamanatkan dalam tujuan pemberlakuan desentralisasi pendidikan.

Pencapaian mutu pendidikan dalam konteks otonomi daerah menurut Pidarta (2001 :24) adalah tercapainya tujuan utama desentralisasi pendidikan yaitu untuk: 1) memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang sudah ada atau lapangan kerja yang akan diadakan di daerah otonom tersebut; 2) memenuhi kepentingan masyarakat atau orang tua akan kebutuhan atau pengembangan minat putra-putri mereka; 3) membantu mengembangkan wilayah kabupaten terutama dalam bidang bisnis; 4) menjaga kelestarian lingkungan alam dari pencemaran atau polusi yang semakin meningkat; 5) menyesuaikan pendidikan dengan ciri geografis di kabupaten itu; 6) menyesuaikan pendidikan dengan ciri kebudayaan, adat istiadat, dan norma-norma masyarakat setempat.

Mata pelajaran akuntansi mempunyai karakteristik sebagai cabang pengetahuan dan sekaligus sebagai profesi. Sebagai cabang pengetahuan ruang lingkup pengetahuan akuntansi sangat dipengaruhi oleh materi bahasan dalam pendidikan akuntansi dan di pihak lain akuntansi sebagai profesi akan menuntut agar pendidikan akuntansi diarahkan pada kebutuhan berbagai pemakai jasa profesi akuntansi tersebut yang tentunya akan mempengaruhi materi pendidikan akuntansi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan pembelajaran akuntansi yang outputnya diharapkan mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para

pemakai jasa akuntansi yakni dunia usaha yang ada atau yang akan diadakan di daerah tersebut dengan mengadopsi ciri geografis maupun ciri kebudayaan, adat istiadat, dan norma masyarakat.

Dan itulah yang mendorong penulis untuk mengkaji permasalahan dalam sebuah penelitian yang berjudul *“Pengelolaan Pembelajaran Akuntansi dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Deskriptif-Analitis terhadap Komponen Pembelajaran Akuntansi dalam Meningkatkan Kebermaknaan Belajar di SMUN Kabupaten Cirebon)”*.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Otonomi Daerah merupakan realitas sosial yang tidak dapat ditampik lagi. Sementara itu Dinas pendidikan kabupaten Cirebon telah menentukan 6 contoh SMUN dari kriteria kelas bawah, menengah dan tinggi untuk dijadikan proyek perintis dalam mengembangkan pola manajemen berbasis sekolah. Namun dalam kenyataannya kebijakan tersebut belum menyentuh pola pembelajaran. Padahal proses pembelajaran merupakan pilar pembentukan kualitas lulusan yang diharapkan. Pembelajaran khususnya pembelajaran akuntansi masih berkuat pada pola lama yang berorientasi pada *teaching centered*, kurikulum yang dipakai masih bersifat sentralistis, begitu juga dengan pengembangan materinya serta cara penyampaian materi dan proses belajar-mengajar pun masih didominasi oleh ceramah, tanya jawab serta latihan, kurang sekali siswa diberi keleluasaan untuk menganalisis dunia usaha yang ada di sekitarnya, padahal otonomi daerah telah diterapkan sejak januari 2001, sehingga memberikan tantangan sekaligus

antisipasi untuk mengelola pembelajaran akuntansi dalam konteks otonomi daerah.

Dari pemikiran dan fenomena tersebut, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini pada dasarnya dapat dirumuskan dalam sebuah pertanyaan penelitian yaitu “bagaimanakah pengelolaan pembelajaran akuntansi dalam konteks Otonomi Daerah terutama dalam meningkatkan kebermaknaan belajar di SMUN Kabupaten Cirebon”

Berdasarkan judul penelitian dan pokok permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dapat disusun dalam sebuah pertanyaan penelitian yang lebih rinci, sebagai berikut:

1. Hal-hal apakah yang dilaksanakan dalam perencanaan pembelajaran akuntansi dalam konteks Otonomi Daerah di SMUN kabupaten Cirebon?
2. Hal-hal apakah yang perlu dilaksanakan dalam proses pembelajaran akuntansi dalam konteks Otonomi Daerah di SMUN kabupaten Cirebon?
3. Hal-hal apakah yang dilaksanakan dalam pengelolaan materi pembelajaran akuntansi dalam konteks Otonomi Daerah di SMUN kabupaten Cirebon. Perubahan atau penyesuaian apakah yang diperlukan berkaitan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah?
4. Hal-hal apakah yang dilaksanakan dalam pengelolaan evaluasi hasil belajar akuntansi dalam konteks Otonomi Daerah di SMUN kabupaten Cirebon?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi pengelolaan pembelajaran akuntansi dalam konteks Otonomi Daerah terutama dalam meningkatkan kebermaknaan belajar di SMUN Kabupaten Cirebon.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui hal-hal yang dilaksanakan dalam perencanaan pembelajaran akuntansi dalam konteks Otonomi Daerah di SMUN kabupaten Cirebon.
- 2) Untuk mengetahui hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam proses pembelajaran akuntansi dalam konteks Otonomi Daerah di SMUN kabupaten Cirebon.
- 3) Untuk mengetahui hal-hal yang dilaksanakan dalam pengelolaan materi pelajaran akuntansi dalam konteks Otonomi Daerah di SMUN kabupaten Cirebon. Perubahan atau penyesuaian apa yang diperlukan berkaitan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah.
- 4) Untuk mengetahui hal-hal yang dilaksanakan dalam pengelolaan evaluasi hasil belajar akuntansi dalam konteks Otonomi Daerah di SMUN kabupaten Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperdalam teori implikasi otonomi daerah dalam Pendidikan, khususnya pembelajaran akuntansi, serta mengetahui tentang dukungan dan kendala guru dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pembelajaran akuntansi dalam konteks otonomi daerah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis rekomendasi atau masukan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak di antaranya adalah:

- 1) Bagi pengembang kurikulum, menjadi umpan balik dalam penyesuaian dan penyempurnaan kurikulum akuntansi khususnya dalam era otonomi daerah ini.
- 2) Bagi guru, menjadi masukan dalam penyesuaian dan perbaikan pembelajaran akuntansi sesuai dengan tuntutan otonomi daerah.
- 3) Bagi Kepala sekolah, menjadi bahan dalam pengembangan sekolah dengan pendekatan manajemen berbasis sekolah dan supervisi.
- 4) Bagi LPTK, sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kompetensi hasil lulusan dalam memperoleh tenaga siap pakai sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.
- 5) Pihak yang berkepentingan, sebagai bahan kajian, referensi, informasi serta pertimbangan dalam memecahkan berbagai permasalahan pendidikan dan untuk penelitian lebih lanjut.



D. Batasan Masalah

Mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi dalam pembelajaran akuntansi di sekolah, maka perlu adanya pembatasan masalah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan di SMUN kabupaten Cirebon.
2. Obyek penelitian ini adalah pembelajaran akuntansi, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pembelajaran (materi pembelajaran, pendekatan atau metodologi pembelajaran) dan evaluasi hasil belajar berkaitan dengan Otonomi Daerah.

E. Asumsi

Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah:

1. Pembelajaran akuntansi memerlukan pengelolaan yang memadai
2. Pengelolaan yang memadai meliputi tiga fungsi dasar yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
3. Komponen pembelajaran akuntansi meliputi unsur-unsur antara lain; tujuan pembelajaran, siswa, guru, materi pembelajaran, dan lingkungan belajar
4. Kabupaten Cirebon telah memberlakukan desentralisasi pendidikan
5. Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri di kabupaten Cirebon telah melaksanakan manajemen berbasis sekolah

F. Definisi Operasional

1. Pengelolaan Pembelajaran Akuntansi

Pengelolaan dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan dengan melibatkan berbagai komponen dalam suatu bidang usaha secara efektif dan efisien. Pembelajaran akuntansi merupakan proses interaksi antara berbagai

komponen yang saling berkaitan untuk membelajarkan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran akuntansi (Oemar Hamalik: 1999: 57). Jadi pengelolaan pembelajaran akuntansi adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran akuntansi dengan melibatkan berbagai komponen dalam pembelajaran akuntansi secara efektif dan efisien.

2. Komponen Pembelajaran Akuntansi

Komponen pembelajaran akuntansi hakekatnya sama dengan komponen pembelajaran pada umumnya. Adapun komponen pembelajaran akuntansi dapat dilihat dari pengertian pembelajaran itu sendiri, yaitu suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur. Manusia yang terlibat dalam pembelajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya misalnya tenaga laboratorium. Material meliputi buku-buku pelajaran, papan tulis, *slide*, film, dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan dan peralatan belajar, dan lain-lain. Prosedur meliputi jadwal serta metodologi penyampaian informasi, praktik belajar, evaluasi dan sebagainya. (Oemar Hamalik : 1999:57). Sedangkan menurut Munandir (1987:2), komponen pembelajaran terdiri dari siswa (si belajar), guru, materi pengajaran, dan lingkungan belajar.

3. Konteks Otonomi Daerah

Konteks dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan sebagai apa yang ada di depan atau di belakang (kalimat, kata, ucapan) yang membantu menentukan makna (kata, kalimat, ucapan) tersebut (Poerwadarminta : 1984: 521), sedangkan Otonomi Daerah menurut UU No. 22 tahun 1999 adalah

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi yang dimaksud konteks Otonomi Daerah dalam penelitian ini adalah “berkaitan dengan otonomi daerah”, dimana otonomi daerah mempunyai implikasi terhadap pembangunan di sebuah daerah termasuk pembangunan di bidang pendidikan.

4. Kebermaknaan belajar

Kebermaknaan belajar adalah kondisi psikologis peserta didik yang menganggap bahwa proses pembelajaran menampilkan sesuatu yang nyata atau berharga bagi pelajar itu sendiri terutama dalam memecahkan persoalan hidup sehari-hari. Belajar yang bermakna terjadi bila proses pembelajaran mengandung makna dan tujuan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan pembangunan daerahnya.

G. Kerangka Penelitian

Kerangka acuan penelitian merupakan landasan atau dasar pemikiran untuk menyoroti dan mengkaji permasalahan penelitian. Paradigma ini disusun berdasarkan pada tinjauan terhadap pengelolaan pembelajaran akuntansi dalam konteks otonomi daerah yang dipandang dari berbagai macam harapan diberlakukannya desentralisasi pendidikan di tingkat kabupaten agar pembelajaran ditujukan untuk:

- 1) memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang sudah ada atau lapangan kerja yang akan diadakan di daerah otonom tersebut;

2. memenuhi kepentingan masyarakat atau orang tua akan kebutuhan dan pengembangan minat putra-putri mereka;
3. membantu mengembangkan wilayah kabupaten terutama dalam bidang bisnis;
4. menjaga kelestarian lingkungan alam dari pencemaran atau polusi yang semakin meningkat;
5. menyesuaikan pendidikan dengan ciri geografis di kabupaten itu;
6. menyesuaikan pendidikan dengan ciri kebudayaan, adat istiadat, dan norma-norma masyarakat setempat.

Konteks otonomi tersebut kemudian menjiwai pengelolaan pembelajaran akuntansi dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi, sehingga kebermaknaan belajar pada diri siswa akan terbentuk. Adapun keenam tujuan desentralisasi pendidikan tersebut, kemudian dipilih sesuai dengan karakteristik mata pelajaran akuntansi yang menekankan pada pembentukan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang sesuai dengan dunia usaha sekitar siswa. Untuk itu harapan dibentuknya desentralisasi pendidikan tersebut dijadikan indikator dalam menentukan pembelajaran akuntansi dalam konteks otonomi daerah di antaranya adalah;

- 1) pembelajaran akuntansi harus disesuaikan dengan lapangan kerja yang ada atau yang akan diadakan di kabupaten Cirebon
- 2) pembelajaran akuntansi harus disesuaikan dengan minat siswa
- 3) pembelajaran akuntansi harus disesuaikan dengan pengembangan wilayah di kabupaten Cirebon terutama dalam bidang bisnis

- 4) pembelajaran akuntansi harus disesuaikan dengan ciri geografis kabupaten Cirebon

Untuk lebih jelasnya ruang lingkup penelitian dapat digambarkan dalam bagan atau kerangka penelitian berikut ini.

Gambar 1.1 Kerangka Acuan Penelitian

